

INSPIRASI UNTUK KEBIJAKAN

Korelasi Kepribadian dengan Hasil Pembelajaran Online Mahasiswa di Masa Pandemi

KEPRIBADIAN mempengaruhi seseorang dalam menghadapi suatu permasalahan, terutama situasi pandemi Covid-19. Suasana *lock-down*, tidak boleh ke mana-mana, setiap keluar rumah diwajibkan untuk memakai masker, dan kondisi sosial ekonomi yang berubah drastis dapat mempengaruhi kebiasaan dan kepribadian seseorang. Ada lima dimensi dasar kepribadian yang sering disebut sebagai ciri kepribadian "Big 5 atau Kepribadian Model Lima Besar". Menurut Goldberg lima ciri kepribadian luas yang dijelaskan oleh teori ini adalah *extraversion*, *agreeableness*, *openness*, *conscientiousness*, dan *neuroticism*.

Kepribadian Model Lima Besar dapat menangkap keteraturan dan perbedaan kepribadian antara orang-orang. Kepribadian *extravert* cenderung memiliki jaringan sosial yang lebih luas dan selalu bisa memberikan bantuan kepada orang lain dibandingkan dengan *introvert*.

Individu yang cenderung *introvert*, kurang suka bersosialisasi, sering memendam masalah sendiri, rentan muncul ide **bunuh diri** , terutama saat menghadapi masalah yang berat. Sebaliknya, seseorang yang memiliki kepribadian *openness* dapat mempengaruhi secara positif tingkat kesejahteraan hidupnya, karena mereka memiliki sikap penalaran dan mudah terbuka terhadap pengalaman yang baru. *Agreeableness* membuat orang menjadi suka menjadi mitra untuk bertukar pendapat karena sikap *agreeableness* memiliki kecenderungan lebih sigap menanggapi kebutuhan orang lain. Kontrol diri merupakan salah satu kekuatan seseorang yang memiliki kepribadian *conscientiousness*. Orang-orang yang memiliki kepribadian *conscientiousness* tidak hanya dianggap lebih dapat dipercaya, tetapi sebenarnya lebih dapat diandalkan, karena mereka lebih cenderung untuk melakukan aksi balas budi. Sementara itu, kepribadian *neuroticism* cenderung tidak menginginkan untuk membuat jaringan sosial.



O l e h
GANIKO MODDILANI, SE., MSC. *)

Penulis melakukan survei online pada bulan Mei 2020 terhadap mahasiswa Indonesia dengan sampel sebanyak 210 mahasiswa. Jika dijabarkan menurut Kepribadian Model Lima Besar, 29% mahasiswa memiliki kepribadian *agreeableness*, 9% *conscientiousness*, 3% *extraversion*, 8% *neuroticism*, dan 52% *openness*. Sebanyak 82% mahasiswa merasa pemahamannya tidak lebih baik dengan pembelajaran online.

Tidak ada perbedaan berdasarkan jenis kelamin. Akan tetapi, mahasiswa yang berumur 24 tahun ke atas porsi yang mengatakan pemahamannya tidak lebih baik, lebih sedikit yaitu sebesar 69%. Untuk mahasiswa S1 sebesar 17% menjawab pemahamannya lebih baik dengan pembelajaran online, sedangkan mahasiswa S2 dan S3 porsi tingkat pemahamannya lebih baik dengan pembelajaran online lebih besar yaitu sebesar 40%. Ketika dijabarkan dengan menggunakan Kepribadian Model Lima Besar, yang paling banyak mengatakan pemahamannya tidak lebih baik dengan pembelajaran online adalah mahasiswa yang memiliki kepribadian *neuroticism* yaitu sebesar 94%. Sementara itu, mahasiswa yang memiliki kepribadian yang lainnya (*agreeableness*, *conscientiousness*, *extraversion*, dan *openness*) porsi pemahamannya tidak lebih baik dengan pembelajaran online di bawah 90%.

Untuk membentuk individu yang memiliki jalinan sosial yang baik maka diharuskan tetap ada kontak sosial dua arah. Akan tetapi yang terjadi saat ini sebagian besar kontak sosial yang dilakukan hanya searah. Dosen memberikan makalah kemudian mahasiswa membaca dan memahami sendiri, setelah itu mahasiswa langsung diberikan tugas. Hal ini membuat mahasiswa merasa tidak nyaman ketika melakukan pembelajaran online. Mereka menganggap bahwa dosen kurang maksimal dalam penyampaian materi perkuliahan yang sedang berlangsung dan beberapa mahasiswa juga merasa masih belum paham. Frekuensi tugas yang meningkat juga menjadi faktor penyebab gejala ketidaknyamanan mahasiswa. Kendala yang lain berupa akses internet, mahasiswa merasa terbebani dengan biaya untuk mengakses internet, ditambah lagi ketika mereka melakukan kuliah online mahasiswa merasa

belum maksimal dalam memahami materi perkuliahan sehingga pengeluaran yang dilakukan dirasa kurang sepadan.

Ada 7 tips yang diberikan oleh Mendikbud Nadiem Makarim dan bisa digunakan untuk solusi masalah ini. Salah satu tips yang dapat digunakan untuk mahasiswa yang berkepribadian *neuroticism* adalah membagi kelompok belajar sesuai dengan kompetensi yang sama. Dalam pembagian kelompok belajar tersebut sesama mahasiswa diharapkan mampu saling bergotong royong, saling memberi masukan, dan saling mengevaluasi hasil dari belajar mereka. Untuk kedepannya agar pembelajaran online ini bisa menjadi lebih baik, dosen diharapkan mampu memberikan penjelasan lebih baik. Mahasiswa juga harus mengikuti proses pembelajaran dengan benar. (*)

*) Penulis adalah peneliti SurveyMETER

Kanwil BPN DIJ Mengikuti Sikap HB X

Nyatakan Instruksi Wakil Gubernur 1975 Tetap Berlaku

JOGJA, Radar Jogja - Efektivitas rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) benar-benar sedang diuji. Permintaan ORI agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIJ menindaklanjuti penerbitan sertifikat hak milik (SHM) bagi sejumlah WNI Keturunan atau warga Tionghoa, terancam tidak berjalan sesuai bunyi rekomendasi.

Sebab, Kanwil BPN DIJ menyatakan Surat Instruksi Wakil Kepala Daerah DIJ (sekarang wakil gubernur) Nomor K 898/I/A/1975 tanggal 5 Maret 1975 tentang penyeragaman *policy* pemberian hak atas tanah kepada seorang WNI Non Pribumi tetap berlaku. "Instruksi (wakil kepala daerah, Red) tetap berlaku sebagaimana mestinya," ujar Kepala Kanwil BPN DIJ Tri Wibisono dalam surat nomor HP.02/1862-34/VIII/2020 sebagai tanggapan atas rekomendasi ORI.

Surat itu diteken Tri pada 18 Agustus 2020. Ditujukan kepada

kepala kantor pertanahan kabupaten/kota se-DIJ, ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Pengurus Wilayah DIJ dan ketua IPPAT pengurus daerah kabupaten/kota se-DIJ.

Tri berdalih surat itu dibuat menindaklanjuti rekomendasi ORI nomor 0001/RM.03.02-13/0052.0079.0087.0103-2016/VII/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang maladministrasi atas belum terlaksananya pendaftaran peralihan hak milik atas tanah oleh kepala pertanahan kabupaten/kota se-DIJ.

Sesuai rekomendasi itu, Tri sebagai kepala Kanwil BPN DIJ selaku atasan langsung para kepala kantor pertanahan tersebut untuk berperan aktif mengawasi pelaksanaan dan melaporkan pelaksanaannya ke ORI.

Setelah rekomendasi itu terbit, Tri telah membuat laporan ke gubernur DIJ melalui surat nomor HP.2/1611-34/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020. Mendapatkan laporan itu, gubernur telah memberikan tanggapan lewat surat nomor 593/2194 tanggal 3 Agustus 2020. Tanggapan gubernur itu intinya menyatakan Surat Instruksi Wakil Kepala Daerah

DIJ Nomor K 898/I/A/1975 tanggal 5 Maret 1975 telah diuji melalui beberapa kompetensi peradilan (peradilan umum, peradilan tata usaha negara dan uji materi).

"Putusan peradilan telah memiliki kekuatan hukum tetap serta dalam putusannya hakim tidak pernah mencabut instruksi wakil kepala daerah tersebut," jelas birokrat asal Surabaya ini.

Terkait beredarnya surat tersebut, Tri mengaku sifat surat tersebut sebagai usulan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN. Usulan itu nantinya menjadi bahan guna menanggapi rekomendasi ORI yang memberikan tenggat waktu bagi BPN membuat tindak lanjut paling lambat 60 hari setelah rekomendasi disampaikan.

"Surat itu masih bersifat usulan," kata pria yang berulang tahun setiap 1 Juni bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila saat ditemui di kampus STPN Jogjakarta kemarin (9/9). Lantaran masih bersifat usulan, tembusan surat dikirimkan ke menteri ATR/kepala BPN dan gubernur DIJ.

Sikap yang diambil Tri itu sejalan dengan surat nomor 593/

0219 yang ditandatangani Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X. Surat HB X itu ditujukan ke menteri ATR/kepala BPN dan kepala Kanwil BPN DIJ.

Isinya gubernur menegaskan, berdasarkan putusan PN Jogja nomor 132/Pdt.G/2017/PN.YK yang dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi Jogjakarta nomor 51/PDT/2018/PT.YYK dan putusan Mahkamah Agung nomor 565K/PDT/2019 tertanggal 11

April 2019 menyatakan, pemberlakuan Surat Instruksi Wakil Kepala Daerah DIJ Nomor K 898/I/A/1975 tanggal 5 Maret 1975 tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Alasannya, bertujuan melindungi kepentingan umum. Yaitu masyarakat ekonomi lemah. Terkait keistimewaan DIJ secara tegas memberikan kewenangan istimewa di bidang pertanahan.

Juga demi menjaga kebudayaan. "Khususnya keberadaan Kasultanan Ngayogyakarta dan menjaga keseimbangan pembangunan dalam rangka pengembangan perencanaan pembangunan di masa yang akan datang," tulis HB X.

Terkait proses pertanahan, HB X meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI untuk melaksanakan dua hal. Pertama, putusan Mahkamah Agung No. 565 K/

PDT/2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kedua, Surat Instruksi Wakil Kepala Daerah DIJ Nomor K 898/I/A/1975 tanggal 5 Maret 1975 tentang penyeragaman *policy* pemberian hak atas tanah kepada seorang WNI Non Pribumi. Belakangan Kanwil BPN DIJ memilih langkah sejalan dengan permintaan gubernur ketimbang menjalankan rekomendasi ORI. (**kus/laz/rg**)

BACAKAN IKRAR: Para babaslon Sleman 2020 saat membacakan ikrar pilkada damai dan pernyataan mematuhi protokol kesehatan selama pelaksanaan pilkada, di Mapolres Sleman, Kamis (10/9).



ELANG KHARISMA DEWANGA/RADAR JOGJA

1.300 Personel Siap Amankan Pilkada

SLEMAN, Radar Jogja - Jajaran Polres Sleman sudah menyiapkan personelnya untuk pengamanan pilkada 2020. Sudah disiapkan 1.300 personel ditambah bantuan dari TNI. Tapi kerja sama dari tiap tim paslon juga ditunggu untuk mewujudkan pilkada yang aman.

Kapolres Sleman AKBP Anton Firmanto menjelaskan, untuk pengamanan selama masa Pilkada, Anton mengaku, pihaknya telah mempersiapkan 1.300 personel. Nantinya, akan ada tambahan dari Polda maupun perbantuan dari TNI. "Untuk personel jumlahnya, disesuaikan dengan skala prioritas di setiap daerah nantinya. Yang jelas sudah kita petaikan daerah mana saja yang rawan konflik," kata Anton usai acara Kampanye Pemakaian Masker

Serentak seluruh Indonesia serta Ikrar Bersama Penandatanganan Pemilukada 2020 yang Aman, Damai dan Sehat di Mapolres Sleman kemarin (10/9).

Untuk antisipasi saat kampanye, Anton juga telah membicarakan hal tersebut dengan pihak Komisi Pemilihan umum (KPU) Sleman. Yang mana, untuk dalam ruangan akan dibatasi hanya 50 orang dan di lapangan terbuka dengan maksimal 100 orang. "Dengan catatan prokes wajib dilaksanakan," tuturnya.

Sementara itu, Ketua KPU Sleman Trapsi Haryadi mengaku pelaksanaan prokes secara spesifik yakni penggunaan masker adalah hal positif yang diinisiasi oleh Polres Sleman. Hal ini juga sesuai dengan PKPU 6 yang direvisi de-

ngan PKPU 10 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Kondisi Bencana. "Salah satunya penggunaan masker dalam setiap tahapan," kata Trapsi.

Para babaslon pun diminta membacakan ikrar bersama mewujudkan Pilkada yang aman, damai dan sehat adalah simbol komitmen bersama *stakeholder* Pilkada yang ada di Sleman. Yang mana kerangka aman, adalah hal yang harus diciptakan bersama-sama. Dengan tidak melupakan sehat dan selamat yang juga menjadi prioritas.

"Karena kita di tengah masa pandemi, KPU juga memberikan perhatian khusus dengan kesehatan dan keselamatan," ungkap Trapsi. (**eno/pr/rg**)

INOVATIF: Selain anggur, IFGI juga membudiyakan berbagai tanaman seperti jahe merah, kunyit hitam, dan pegagan. Mereka juga telah mencoba menanam bakau di air tawar dan tanah kering.



FOTO: FOTO: ERLIN LUTVIA FOR RADAR JOGJA

Kembangkan 100 Jenis Tanaman Anggur dari Berbagai Negara IFGI Kenalkan Pertanian Modern Berbasis IoT

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang kehutanan, Indonesian Forestry and Governance Institute (IFGI), mengenalkan pertanian modern. LSM yang berada di Depok, Sleman, ini sudah berdiri sejak tahun 2010.

BERANGKAT dari hobi yang sama, pegiat agribisnis Agus Affianto bersama rekannya mengembangkan pertanian modern berbasis mikroba. Selain itu mereka juga memanfaatkan Internet of Things (IoT) untuk mengontrol seluruh proses pertanian.

Hingga kini, di lahan seluas 1.200 m2 itu terdapat lebih dari 100 jenis tanaman anggur dari berbagai negara yang sedang mereka kembangkan. "Kami baru uji coba apakah valid berbuah di Indonesia. Jenisnya macam-macam, dan salah satunya impor dari Ukraina," jelas Agus.



Tak hanya anggur, IFGI juga membudiyakan berbagai tanaman seperti jahe merah, kunyit hitam, dan pegagan. Mereka juga telah mencoba menanam bakau di air tawar dan tanah kering. "Bakau ini sudah bertahun-tahun di media kering. Sebelumnya kami fermentasikan dengan mikroba," tambahnya. Bukan hanya berorientasi bisnis,

IFGI juga melakukan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan produktivitas pertanian. "Masyarakat kita kan melihat baru percaya. Jadi memang kita kembangkan, kita lihat validitasnya, kontrol, dan sebagainya. Sekaligus ini sebagai tempat pembelajaran," ujar Agus. (***/mg1/laz/rg**)